

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis korespondensi yang digunakan untuk memetakan hubungan dan keterkaitan antara dua variabel kategori dan untuk menjawab rumusan masalah pertama, tentang keterkaitan peta rawan tsunami terhadap pemilihan orientasi bermukim masyarakat yakni:

A. Jarak

Masyarakat pesisir barat Kota Padang yang tidak ingin pindah dipengaruhi oleh faktor kedekatan dengan kota (42,9%) dan kedekatan keluarga sebesar (31,9%). Hal itu dikarenakan masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik antara tempat tinggal dan dekat keluarga. Sedangkan untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang ingin pindah dipengaruhi oleh dekat dengan kota sebesar (42,9%) dan dekat tempat kerja sebesar (41,3%). Hal itu dikarenakan masyarakat sudah tidak nyaman lagi tinggal dekat dengan kota dan dekat tempat kerja akibat pengaruh peta rawan tsunami dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat. Untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang memilih biasa-biasa saja dipengaruhi oleh kelengkapan sarana dan prasarana sebesar (64,3%) karena kelengkapan fasilitas seperti pusat perbelanjaan, sekolah, bandara, dan lain-lain, yang ada didekat daerah rawan bencana sehingga masyarakat enggan untuk berkeinginan untuk pindah.

B. Kepemilikan rumah

Masyarakat pesisir barat Kota Padang yang tinggal dirumah dinas (54.5%) tidak ingin pindah karena orang yang menetap di rumah dinas hanya bersifat sementara (ikatan dinas), mereka baru akan pindah sesuai dengan perintah atasan. Sedangkan untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang berstatus menyewa rumah (60%) ingin pindah karena orang yang menyewa hanya menetap sementara (belum mempunyai rumah tetap) dan masih ingin mencari rumah yang lebih aman dari ancaman bencana tsunami. Untuk masyarakat

pesisir barat Kota Padang yang memiliki rumah sendiri (35,9%) bersikap biasa-biasa saja dikarenakan masyarakat yang memiliki rumah sendiri menjadikan rumahnya sebagai tempat usaha dalam mencari nafkah. Untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang dengan status rumah warisan (27,8%) sangat ingin pindah karena masyarakat yang tinggal di rumah warisan tidak nyaman tinggal di daerah rawan tsunami dan mencari daerah yang lebih aman.

C. Tingkat pendidikan

Masyarakat pesisir barat Kota Padang yang tidak ingin pindah umumnya mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar (61,1%) karena masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah kurang memahami informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Sedangkan untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang berpendidikan strata satu (50%) ingin pindah karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga pemahaman terhadap kebencanaan. Untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang tidak sekolah (66,7%) memilih biasa-biasa saja karena tingkat pendidikan yang sangat rendah mempengaruhi dalam mencerna informasi kebencanaan dan menjadi acuh terhadap informasi yang disampaikan pemerintah.

D. Penyebaran Informasi

Masyarakat pesisir barat Kota Padang yang mendapat informasi terkait bencana tsunami dari LSM (46,7%), pemerintah (44,2%) dan cerita tetangga (42,9%) memiliki kecenderungan ingin pindah karena informasi yang diberikan membuat masyarakat takut dan resah tinggal di daerah rawan tsunami, salah satu contoh informasi yakni adanya surat edaran gubernur tentang siaga gempa dan tsunami. Sedangkan untuk masyarakat pesisir barat Kota Padang yang mendapat informasi dari pengalaman sendiri sebesar (43,5%) bersikap biasa-biasa saja karena masyarakat sudah biasa mengalami kejadian tersebut.

2. Berdasarkan perubahan orientasi bermukim masyarakat terhadap pola ruang RTRW Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa perpindahan penduduk telah sesuai dengan pola ruang Kota Padang namun perpindahan tersebut bukan merupakan

tempat yang tepat karena pola ruang Kota Padang belum mengakomodir potensi bencana lainnya yang sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007. Informasi yang di berikan pemerintah dalam pengurangan resiko bencana tidak selamanya bersifat positif karena telah menimbulkan perubahan orientasi bermukim masyarakat di Kota Padang. Namun perubahan orientasi bermukim bukan solusi yang tepat karena pola ruang Kota Padang belum tanggap terhadap potensi bencana yang ada. Sehingga perlunya kajian dan evaluasi yang lebih dalam terkait penyampaian informasi oleh pemerintah agar tidak membuat masyarakat salah dalam menanggapi informasi kebencanaan yang telah dibuat pemerintah.

5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah daerah

- Seharusnya pemerintah lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi karena dapat menyebabkan ketakutan masyarakat tentang bahaya bencana dan menyebabkan salah persepsi seperti surat edaran gubernur sumatra barat.
- RTRW yang dibuat pemerintah seharusnya dapat mengakomodir semua jenis potensi bencana yang ada di Kota Padang yang sesuai dengan UU NO.26 Tahun 2007.

2. Bagi akademisi

- Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai resiko bencana terhadap struktur ruang Kota Padang
- Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai harga lahan terhadap jenis potensi bencana di Kota Padang.